

## Kualitas Pembangunan Manusia Di Wilayah Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku

Fitri Febrianti<sup>1</sup> & Ida Nuraini<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Jl. Raya Tlogomas 246 Malang

\*e-mail : : nurainiida@yahoo.com

---

### ABSTRAK

#### Artikel Info

**Received :**

28 February 2024

**Revised :**

15 April 2024

**Accepted :**

28 April 2024

**Kata Kunci:**

Pembangunan Manusia,  
Pengeluaran Perkapita,  
Rasio Gini, Pengangguran  
Terbuka.

**Keywords:**

Human Development, Per  
Capita Expenditure, Gini  
Ratio, Unemployment.

Saat ini pembangunan manusia di Indonesia masih belum merata khususnya antara kawasan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengeluaran perkapita, gini ratio, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia di koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku yang merupakan kawasan timur Indonesia. Jenis data pada penelitian ini ialah data sekunder. Sumber data adalah Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2014- 2020. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan data panel. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengeluaran perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, rasio gini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku.

---

## *The Quality of Human Development in the Papua-Maluku Islands Economic Corridor Region*

---

### ABSTRACT

Currently, human development in Indonesia is still uneven, especially between western Indonesia and eastern Indonesia. The purpose of this study was to analyze the effect of per capita expenditure, the gini ratio, and the open unemployment rate on the human development index in the Papua-Maluku Islands economic corridor which is the eastern part of Indonesia. The type of data in this study is secondary data. The data source is the Indonesian Statistics Center for 2014-2020. The analysis used is multiple regression with panel data. The results of the study reveal that per capita expenditure has a positive and significant effect on the human development index, the gini ratio has a negative and insignificant effect on the human development index, while the open

*unemployment rate has a negative and significant effect on the human development index in the Papua-Maluku Islands economic corridor.*

---

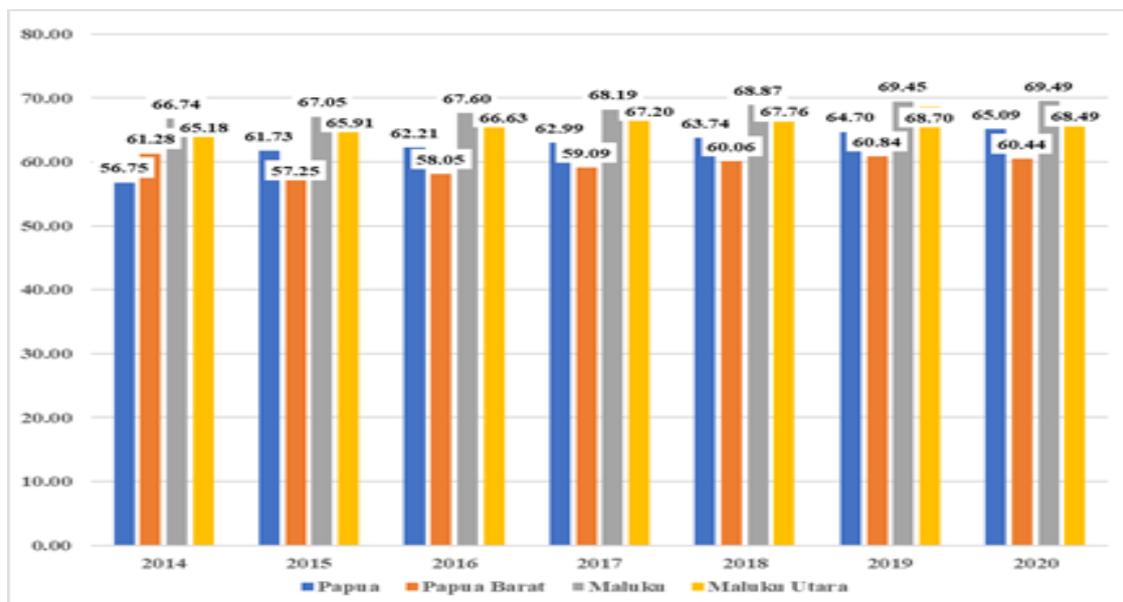
## **PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan suatu usaha yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup beserta peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam sebuah negara, tentu saja kegiatan pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan. Tidak terkecuali dengan negara Indonesia, saat ini fokus pembangunan negara Indonesia adalah pembangunan di bidang sumber daya manusia untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan orang tetapi juga menjadi tujuan. Pembangunan manusia beranggapan bahwa orang harus berpengaruh terhadap proses yang membentuk kehidupan mereka. Pembangunan manusia merupakan suatu pengembangan yang dilakukan masyarakat dengan melalui pembangunan pada kemampuan manusia, yang mana peran utamanya yaitu masyarakat dengan melalui partisipasi aktif dalam sebuah proses yang nantinya akan membentuk kehidupan dan masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupannya. Jadi pembangunan manusia itu lebih luas dibandingkan dengan pendekatan lain, yaitu seperti pendekatan sumber daya manusia, pendekatan kebutuhan dasar, dan pendekatan kesejahteraan manusia. (Yektiningsih, 2018). Saat ini penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Millennial dan generasi Z yang merupakan penduduk usia produktif, antara usia 16-40 tahun, untuk itu peran pemerintah melalui kebijakan pembangunan harus terarah dan memiliki target tertentu untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Menurut UNDP (1995) paradigma pembangunan manusia terdiri atas 4 (empat) komponen utama, yaitu : (1) Produktifitas, dengan adanya produktifitas, masyarakat harus mampu meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi secara penuh dalam proses untuk memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bagian dari berbagai jenis pembangunan manusia. (2) Ekuitas, di dalam ekuitas, masyarakat harus mempunyai akses dalam memperoleh kesempatan yang adil. Hambatan yang ada dalam peluang ekonomi dan politik harus dihapus, yang bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendapatkan manfaat dari kesempatan tersebut. (3) Kesenambungan, sebuah akses dalam mendapatkan kesempatan terlebih dahulu harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Adapun segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi. (4) Pemberdayaan, dilakukannya pembangunan oleh masyarakat dan masyarakat juga harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan juga proses yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya peningkatan dalam bidang kemampuan, produktifitas dan kreatifitas manusia nantinya juga akan meningkat dan hal tersebut dapat menjadikan pertumbuhan yang efektif.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolak ukur dalam pencapaian pembangunan manusia yang lebih berkualitas. Ada tiga dimensi dasar sebagai acuan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia yaitu meliputi umur panjang dan hidup yang sehat (*a long*

and healthy life), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup yang layak (*desent standart of living*) (Badan Pusat Statistik, (2021). Wilayah Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku merupakan salah satu wilayah koridor yang memiliki indeks pembangunan manusia terendah (rata-rata 64,34) dibanding Wilayah Koridor Ekonomi lainnya. Jika dibandingkan dengan IPM nasional sebesar 70,67 maka koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku masih jauh berada di bawah IPM nasional. Untuk itu penting diketahui beberapa faktor penyebab rendahnya IPM di koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku ini. Grafik dibawah menggambarkan IPM yang ada di 4 Provinsi wilayah koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku.



Sumber : Badan Pusat Statistik (2020), data diolah.

**Gambar 1.** Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku Tahun 2014-2020.

Gambar 1 di atas menunjukkan lambatnya perkembangan pembangunan manusia di wilayah koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku. Diantara 4 provinsi di koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku, provinsi yang memiliki rata-rata indeks pembangunan manusia terendah yaitu Provinsi Papua Barat sebesar 59,57 dan rata-rata indeks pembangunan manusia tertinggi yaitu provinsi Maluku sebesar 68,20. Dalam menaikkan indeks pembangunan manusia peran pemerintah pusat dan daerah sangat penting khususnya melalui kebijakan penganggaran pembangunan. Kebijakan belanja daerah harus tepat dan mampu mendorong produktivitas masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Penciptaan lapangan kerja sebagai langkah distribusi pendapatan yang kurang merata harus dapat ditutup dengan kebijakan penganggaran dan peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat.

Studi mengenai analisis pengaruh Pengeluaran Perkapita, Gini Ratio, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap indeks pembangunan manusia sebelumnya sudah dibuktikan pada beberapa penelitian di Indonesia. Manurung & Hutabarat (2021) menyatakan bahwa pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan menurut Hannum (2018) variabel pengeluaran per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Gini Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di daerah

Jogyakarta (Basuki & Saptutyningasih, 2016). Sedangkan menurut Chotimah (2016) menyatakan bahwa Gini Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan. Selanjutnya, Ningrum et al. (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Sedangkan Basri (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Jawa Timur.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, terlihat perbedaan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif bisa positif terhadap indeks pembangunan manusia. Gini rasio dari penelitian di atas ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Pengeluaran perkapita dari penelitian di atas ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan adanya perbedaan dari berbagai hasil penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang variabel pengeluaran perkapita, gini ratio, dan tingkat pengangguran terbuka dengan objek atau wilayah yang berbeda yaitu pada koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku, yang mana daerah ini memiliki indeks pembangunan manusia yang masih tertinggal dibandingkan koridor lainnya. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengeluaran Perkapita, Gini ratio, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku.

Kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat ditinjau dari suatu tingkatan hidup tiap masyarakat. Tingkat hidup masyarakat dapat tercermin dari rendahnya kemiskinan, kesehatan yang baik, tingkat pendidikan yang meningkat, dan tingkat produktivitas masyarakat. Hal itu dapat digambarkan sebagai peningkatan tingkat pendapatan masyarakat (Todaro & Smith, 2009) Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu masyarakat atau kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk konsumsi pangan dan non pangan, tingkat pendidikan keluarga, dan tingkat kesehatan keluarga. Kesejahteraan masyarakat yang menyangkut kesejahteraan secara keseluruhan anggota masyarakat, kesejahteraan dari beberapa individu atau kesejahteraan bersama. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah ukuran yang berfungsi untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dan dapat dilihat dari beberapa komponen yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Indeks pembangunan manusia merupakan sebuah alat ukur yang dapat digunakan dalam mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang ada di suatu daerah.

Dalam kaitannya dengan Pengeluaran Perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia, Keynes mengemukakan teori konsumsi yang fenomenal dan dianggap sebagai sebuah keberhasilan empiris pada zamannya. Teori yang dikemukakan oleh Keynes ini berpendapat bahwa bila seseorang mendapatkan tambahan pendapatan, maka secara alamiah dia akan menambah konsumsi namun besarnya tambahan konsumsi ini tidak akan sebesar tambahan pendapatannya. (Mankiw, 2007). Kenaikan pendapatan ini disebutkan dalam besarnya *Marginal Propensity to Consume* (MPC), dimana besarnya MPC ini yaitu antara 0 sampai 1. MPC ini juga sering disebut dengan kecenderungan berkonsumsi masyarakat, yang merupakan presentase dari pendapatan yang digunakan untuk berkonsumsi. Hal ini apabila terjadi kenaikan pendapatan, maka jumlah konsumsi juga akan naik. Dengan meningkatnya pengeluaran perkapita yang ada di masyarakat, maka pendapatan yang ada di masyarakat

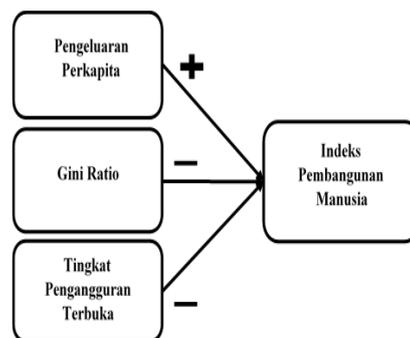
juga akan meningkat. Dengan hal tersebut masyarakat akan mudah untuk mengakses pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran barang dan jasa dengan begitu kesejahteraan Masyarakat akan mengalami kenaikan. Teori konsumsi Keynes mengatakan bahwa pendapatan disposable dapat mempengaruhi tingkat konsumsi saat ini, yaitu pengeluaran konsumsi akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan (Ibrahim, 2016). Pola pengeluaran per kapita penduduk dipengaruhi pendapatan dan kebutuhan hidup masyarakat baik untuk makanan maupun non makanan, sehingga pola pengeluaran per kapita berbeda. Todaro & Smith, (2013) mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan di banyak daerah. Pembangunan manusia juga tentunya akan mendapatkan dampak dari kinerja timpang atau tidaknya distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah. Karena ketika pendapatan penduduk rendah maka akan berdampak pula terhadap pembangunan di wilayahnya, diantaranya yaitu: rendahnya daya beli masyarakat yang dapat menyebabkan pembangunan bidang ekonomi kurang berkembang dengan baik. Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah dan menyebabkan hasil pembangunan hanya banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat kelas sosial menengah ke atas.

Pembangunan manusia memainkan peran dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran guna melakukan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dengan teratasinya jumlah pengangguran, maka pendapatan akan meningkat sehingga akan berdampak pada peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan bagian pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi, pengurangan pengangguran dapat mengakibatkan peningkatan indeks pembangunan manusia. Penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia di Jawa timur mengungkapkan hasil bahwa variabel Gini Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan. (Chotimah, 2016). Sementara itu penelitian yang berbeda (Basuki & Saptutyingsih, 2016) menyimpulkan bahwa Pendapatan Perkapita tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah Untuk Fasilitas Umum mempunyai hubungan positif dengan Indeks Pembangunan Manusia, Rasio gini mempunyai pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan Jumlah Penduduk Miskin memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian di wilayah Jawa Timur mengungkapkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Jawa Timur. (Basri, 2016). Sementara penelitian yang berbeda Ningrum et al. (2020) mengungkapkan bahwa secara parsial variabel Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Sementara itu Anggita & Riyanto (2021) dalam penelitiannya di Kabupaten Kepulauan Madura mengungkapkan bahwa variabel Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Madura.

Di beberapa negara di ASEAN mengungkapkan bahwa *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan, Korupsi berpengaruh positif dan signifikan, GDP Per Kapita berpengaruh negatif dan signifikan, dan *Government Spending* berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Andini, 2017). Sementara penelitian lain dari Sholekhah (2018) menyatakan bahwa GDP per kapita, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos dan Kamboja. Penelitian lain yang menyatakan bahwa keempat variabel tersebut menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan dengan IPM. Dari empat variabel, tiga variabel tidak termasuk kepadatan penduduk menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan NIHDI. Kepadatan penduduk memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan NIHDI. Jadi, kabupaten dengan pembangunan manusia yang buruk terutama kabupaten di wilayah Punjab Barat dan Selatan diidentifikasi sebagai target intervensi kebijakan khusus untuk meningkatkan pembangunan manusia. (Matter, 2015)

Berdasar uraian di atas maka Hipotesis yang diajukan adalah : diduga Pengeluaran Perkapita berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Gini Ratio, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negative terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Untuk itu kerangka konseptual penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Konseptual

**METODE**

Obyek penelitian adalah provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Pemilihan obyek berdasarkan pertimbangan rendahnya kualitas pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder berupa data pengeluaran perkapita, gini ratio, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia dari tahun 2014 sampai 2020. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Teknik dokumentasi. Metode analisis pada penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggabungkan antara data cross section dan time series. Adapun persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 [\text{Log(PP)}]_{it} - \beta_2 (\text{GR})_{it} - \beta_3 [\text{TPT}]_{it} + \epsilon_{it}$$

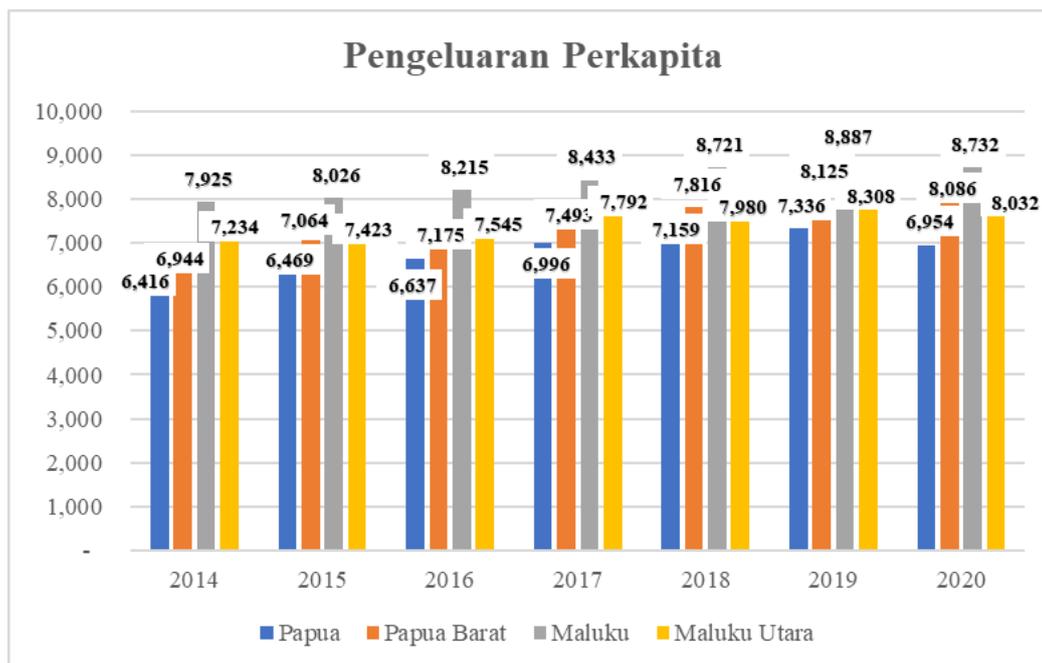
Dimana Y merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PP adalah Pengeluaran Per Kapita Provinsi, GR adalah Gini Ratio Provinsi, TPT adalah Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi,  $\beta_0$  adalah Konstanta,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$  adalah Parameter variabel independent, t adalah data time series 2014-2020, I adalah data cross section Provinsi dan  $\epsilon$  adalah ingkat kesalahan pengganggu. Model regresi adalah *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*,

dan *Random Effect Model*. Pemilihan model terbaik dilakukan dengan uji Chow, uji Hausman dan Lagrange Multiplier. Uji statistic yang digunakan adalah t test dan F test.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah koridor papua-kepulauan maluku merupakan wilayah yang berada di kawasan timur Indonesia yang tergolong masih tertinggal dalam pembangunan bidang sosial, ekonomi dan sumberdaya manusia. Keadaan sosial ekonomi di wilayah koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku dapat tercermin dari rata-rata pengeluaran perkapita pada tahun 2014 sampai dengan 2020 cenderung mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya, hal itu dapat dibuktikan karena di daerah tersebut biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi rumah tangga masyarakatnya tinggi. Namun distribusi pendapatan yang tercermin dari rata-rata gini rasionya pada tahun 2014 sampai dengan 2020 cenderung mengalami kenaikan (semakin tidak merata). Angka pengangguran terbuka daerah koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku pada tahun 2014 sampai dengan 2020 juga cenderung mengalami kenaikan. Memburuknya distribusi pendapatan dan kondisi ketenagakerjaan tersebut haruslah mendapat perhatian sehingga perlu dicarikan solusinya.

Dibawah ini deskripsi pengeluaran per kapita, gini rasio, dan tingkat pengangguran yang terdapat pada 4 propinsi koridor kepulauan Papua - Kepulauan Maluku dari tahun 2014 sampai 2020 :

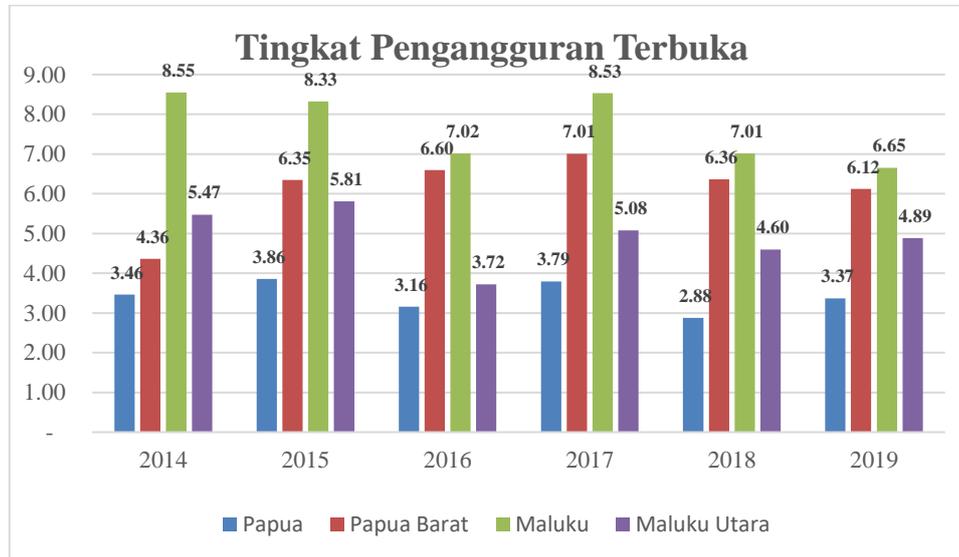


Sumber : Badan Pusat Statistik (2020), data diolah.

**Gambar 3.** Pengeluaran Perkapita Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku tahun 2014-2020 (Jutaan Rupiah)

Berdasarkan gambar 3 di atas, dapat dilihat bahwa pengeluaran perkapita pada wilayah koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut bisa terjadi karena pendapatan yang diperoleh masyarakat tinggi sehingga daya beli masyarakat juga mengalami kenaikan. Adapun pengeluaran perkapita tertinggi yaitu pada Provinsi Maluku di tahun 2019 dengan nilai sebesar 8,887 juta rupiah, sedangkan untuk pengeluaran perkapita terendah yaitu pada Provinsi Papua di tahun 2014

dengan nilai sebesar 6,416 juta rupiah. Dari grafik di atas nampak jelas bahwa di Kawasan Timur Indonesia sendiri terjadi ketimpangan pengeluaran penduduk yaitu antara provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku serta Maluku Utara. Ketimpangan ini akan lebih terlihat jika kita bandingkan dengan provinsi-provinsi dikawasan Indonesia Bagian Barat.

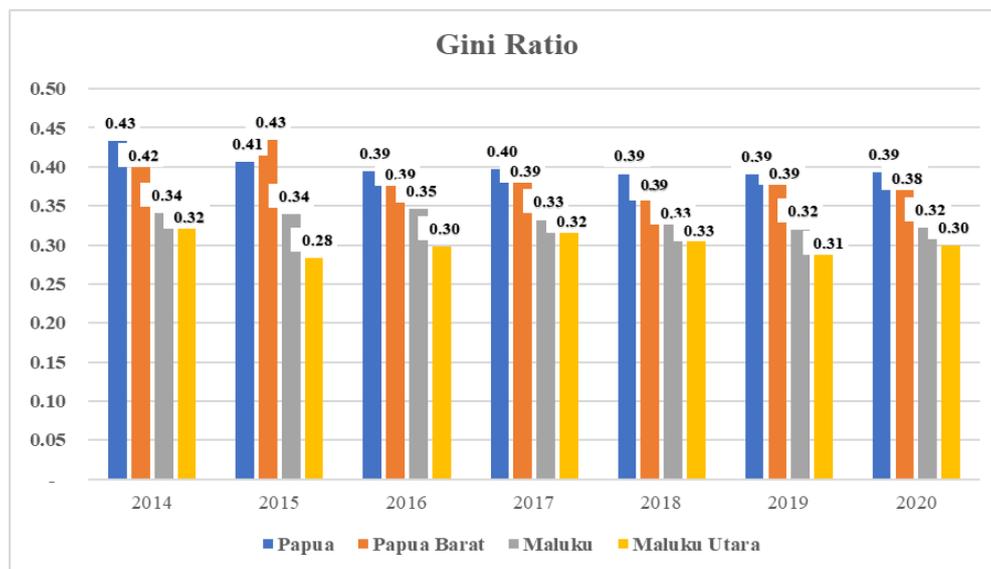


Sumber : Badan Pusat Statistik (2020), data diolah.

**Gambar 4.** Tingkat Pengangguran Terbuka Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku tahun 2014-2020 (Persen)

Berdasarkan gambar 4 di atas, tingkat pengangguran terbuka yang ada di koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku cenderung mengalami fluktuatif namun memiliki trend yang menurun. Hal tersebut karena pada masing-masing provinsi lapangan pekerjaan yang ada dan kualitas sumber daya manusianya berbeda. Adapun tingkat pengangguran terbuka tertinggi yaitu berada pada Provinsi Maluku di tahun 2014 dengan angka sebesar 8,55%. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka terendah yaitu berada pada Provinsi Papua di tahun 2018 dengan angka sebesar 2,88%.

Berdasarkan gambar 5 gini ratio di atas, provinsi Papua dan Papua Barat memiliki gini ratio yang lebih tinggi dibandingkan provinsi Maluku dan Maluku Utara, hal ini berarti ketimpangan distribusi pendapatan lebih tinggi di Papua dan Papua Barat, namun di keempat provinsi tersebut memiliki tren gini ratio yang semakin menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan semakin lebih baik atau lebih merata. Adapun gini ratio tertinggi berada pada Provinsi Papua di tahun 2017 dengan nilai 0,40. Sedangkan untuk gini ratio terendah berada pada Provinsi Maluku Utara di tahun 2015 dengan nilai 0,28.



Sumber : Badan Pusat Statistik (2020), data diolah

**Gambar 5.** Gini Ratio di Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku Tahun 2014-2020

Untuk menentukan model regresi apakah Fixed Effect Model atau Common Effect Model dilakukan dengan uji Chow. Penentuan model terbaik dapat dilihat melalui probabilitas Cross-section F.

H<sub>0</sub> : common effect lebih sesuai dari pada fixed effect

H<sub>1</sub> : fixed effect lebih sesuai dari pada common effect

Kriteria H<sub>0</sub> ditolak apabila probabilitas cross-section F < ( 0,05)

**Tabel 1.** Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.190225	(3,21)	0.0000
Cross-section Chi-square	32.304769	3	0.0000

Sumber : Olah Data Eviews, 2022

Berdasarkan Uji Chow pada tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas cross- section F sebesar 0.0000 nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa H<sub>0</sub> ditolak dan menerima H<sub>1</sub> dengan kata lain model Fixed Effect lebih sesuai. Sementara itu Uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik antara Random Effect Model dan Fixed Effect Model, penentuan model terbaik dapat dilihat melalui probabilitas Cross-section random yang kemudian dibandingkan dengan derajat kepercayaan  $\alpha=0,05$ .

H<sub>0</sub> : Random Effect lebih sesuai dari pada Fixed Effect

H<sub>1</sub> : fixed effect lebih sesuai dari pada Random Effect

Kriteria H<sub>0</sub> ditolak jika probabilitas Cross-section random (0,05)

**Tabel 2.** Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	45.570675	3	0.0000

Sumber : Olah Data Eviews, 2022

Berdasarkan Uji Hausman dapat diketahui bahwa nilai probabilitas cross-section random sebesar 0.0000 nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$  dengan kata lain model Fixed Effect lebih sesuai. Berdasarkan hasil dari kedua uji pemelihan model terbaik yakni Uji Chow dan Uji Hausman menunjukkan hasil bahwa Fixed Effect Model merupakan model terbaik. Untuk itu pada pemilihan model ini tidak diperlukan Uji Lagrange Multiplier (LM) karena dari kedua uji yaitu Chow dan Hausman keduanya menghasilkan model terbaik yaitu Fixed Effect Model..

**Tabel 3.** Regresi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-87.43156	55.17419	-1.584646	0.1280
LOG(P_PERKP_)	18.52322	5.675681	3.263612	0.0037
GR	-26.51942	18.41901	-1.439785	0.1647
TPT	-0.759428	0.361251	-2.102220	0.0478

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.925450	Mean dependent var	64.33857
Adjusted R-squared	0.904150	S.D. dependent var	3.946873
S.E. of regression	1.221940	Akaike info criterion	3.451074
Sum squared resid	31.35587	Schwarz criterion	3.784125
Log likelihood	-41.31504	Hannan-Quinn criter.	3.552891
F-statistic	43.44823	Durbin-Watson stat	1.385873
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Olah Data Eviews, 2022.

Dari tabel tersebut maka dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -87.43156 + 18.52322X_1 - 26.51942X_2 - 0.759428X_3 + 1.221940$$

Berdasarkan persamaan model regresi dapat dijelaskan sebagai berikut : Nilai konstanta adalah sebesar -87.43156, artinya apabila Pengeluaran Per kapita, Gini Ratio, dan Tingkat Pengangguran Terbuka bernilai 0, maka tingkat Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar -87.43156. Nilai koefisien regresi variabel Pengeluaran Per kapita sebesar 18.52322, artinya apabila Pengeluaran Per kapita mengalami kenaikan 1 persen, maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami kenaikan sebesar 18.52322, dengan asumsi

variabel independen lainnya dianggap konstan. Nilai koefisien regresi variabel Gini Ratio sebesar  $-26.51942$ , artinya apabila Gini Ratio mengalami kenaikan 1 persen, maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami penurunan sebesar  $-26.51942$ , dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Nilai koefisien regresi variabel Tingkat Pengangguran Terbuka bernilai sebesar  $-0.759428$ , artinya apabila Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan 1 persen, maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami penurunan sebesar  $-0.759428$ , dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan hasil Uji t diketahui bahwa nilai probabilitas variabel pengeluaran per kapita adalah sebesar  $0.0037$ . Nilai Probabilitas tersebut lebih kecil dari nilai batas kritis  $0,05$  ( $0,0037 < 0,05$ ), maka menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Sehingga dapat disimpulkan pengeluaran per kapita secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai probabilitas variabel Gini Ratio adalah sebesar  $0.1647$ . Nilai Probabilitas tersebut lebih besar dari nilai batas kritis  $0,05$  ( $0,1647 > 0,05$ ), maka menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$ . Sehingga dapat disimpulkan Gini Ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Probabilitas variabel Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebesar  $0.0478$ . Nilai Probabilitas tersebut lebih kecil dari nilai batas kritis  $0,05$  ( $0,0478 < 0,05$ ), dengan demikian menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Sehingga dapat disimpulkan Tingkat Pengangguran Terbuka secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan hasil Uji F diketahui bahwa nilai probabilitas F-statistic adalah sebesar  $0.0000$ . Nilai Probabilitas tersebut lebih kecil dari nilai batas kritis  $0,05$  ( $0,0000 < 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan keseluruhan variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai koefisien determinasi R-Square digunakan untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi regresi data panel fixed effect diperoleh nilai R-squared sebesar  $0.925450$  atau  $92\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas yaitu Pengeluaran Per kapita, Gini Ratio, dan Tingkat Pengangguran Terbuka dalam menjelaskan variabel terikat Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Maluku sebesar  $92\%$  dan sisanya sebesar  $8\%$  dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model ini.

## Pembahasan

### Pengaruh Pengeluaran Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran per kapita merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan setiap golongan ekonomi rumah tangga. Selain itu juga merupakan indikator yang digunakan untuk melihat secara umum apakah rumah tangga dengan golongan termiskin memiliki pengeluaran per kapita jauh di bawah rumah tangga terkaya. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel diatas menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan teori yang mana makin tinggi pengeluaran perkapita artinya makin sejahtera, dan juga selaras dengan hasil penelitian Manurung & Hutabarat (2021) yang mana pada penelitiannya menjelaskan bahwa pengaruh pengeluaran perkapita dengan indeks pembangunan manusia terjadi karena daya beli masyarakat yang merupakan bentuk ukur dari standar kelayakan hidup bagi masyarakat, yang berarti bahwa daya beli masyarakat yang tinggi menggambarkan pembangunan manusia yang baik. Oleh sebab itu IPM sebagai salah satu indikator kesejahteraan manusia dapat dinaikkan dengan cara menaikkan pengeluaran per

kapita, dan hal ini berarti harus ada peningkatan dalam pendapatan masyarakat. Untuk itu penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya perlu diwujudkan.

### **Pengaruh Gini Ratio Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Ketimpangan pembagian pendapatan relative antar penduduk dalam suatu wilayah dapat tercermin dari angka gini rasio. Makin tinggi angka gini rasio menggambarkan makin timpang distribusi pendapatan antar penduduk. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dan pengujian statistik yang dilakukan, maka diketahui bahwa gini ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini berarti makin timpang distribusi pendapatan berarti makin menurun pembangunannya, namun pengaruh ini tidak signifikan. Namun realitas pada obyek penelitian yaitu di wilayah koridor ekonomi papua-kepulauan maluku menunjukkan data tingginya angka gini ratio yang dibarengi oleh tingginya angka pengangguran. Meskipun hasil menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, namun ketimpangan distribusi pendapatan merupakan hal buruk yang dapat menjadi gejala sosial, ekonomi dan politik bangsa, sehingga tetap merupakan hal yang harus mendapat perhatian. Pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan saja tidak akan membawa dampak bagi kesejahteraan, sehingga harus diwujudkan pula pemerataannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Basuki & Saptutyingsih (2016) yang mana menjelaskan bahwa terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga naiknya kesenjangan yang dapat menghambat naiknya pembangunan manusia.

### **Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Pengangguran merupakan beban bagi pemerintah dalam pembangunan. Orang yang tak berpenghasilan akan menutup akses mereka terhadap Pendidikan, kesehatan dan kesempatan ekonomi lainnya, dan akan menjadi beban bagi mereka yang produktif. Semakin banyak pengangguran semakin tinggi angka ketergantungan yang hal ini akan memperburuk kesejahteraan. Berdasarkan hasil analisis pada pengolahan data panel di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pengangguran memang menjadikan orang tertutup untuk mendapat akses apapun sehingga tidak memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, kesehatan maupun meningkatkan pendapatannya. Hal ini sejalan dengan teori dan hasil penelitian Basri (2016) yang mana pada penelitiannya menjelaskan bahwa tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga mengakibatkan masyarakat tidak dapat mempunyai pendapatan yang bisa memperbaiki kualitas sumber daya manusianya itu sendiri seperti pendidikan. Untuk itu kebijakan pemerintah dalam pasar kerja perlu mendapat prioritas utama. Penghapusan pengangguran akan berdampak pada penghapusan kemiskinan seperti yang tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) tahun 2030. Jika Human Development Indeks (HDI) bergerak ke arah yang benar maka kemungkinan besar SDG akan mengalami kemajuan karena banyak yang berhubungan antara SDG dengan HDI seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. (Conceicao, 2019).

### **SIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Peningkatan Pengeluaran Perkapita di wilayah Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku akan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Timpangnya distribusi pendapatan tidak mempengaruhi kualitas pembangunan manusia, karena saat ini

pembangunan lebih mengutamakan pertumbuhan dibanding pemerataan, namun masalah ketimpangan distribusi pendapatan perlu mendapat perhatian karena dapat menimbulkan gejala sosial, ekonomi dan politik yang dapat menghambat pembangunan. Pengangguran Terbuka dapat menurunkan angka Indeks Pembangunan Manusia atau memperburuk kualitas pembangunan manusia di Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku.

Untuk itu dalam mewujudkan pembangunan manusia khususnya di wilayah koridor ekonomi papua-kepulauan maluku maka kebijakan pemerintah dalam penciptakan lapangan kerja seluas-luasnya yang memberikan kesempatan bagi semua masyarakat perlu diprioritaskan. Dengan hal ini akan memberikan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan sehingga dapat meningkatkan pengeluaran per kapitanya. Peningkatan pengeluaran per kapita ini mencerminkan kesanggupan mereka dalam mengakses Pendidikan yang tinggi dan dapat mengakses kesehatan yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas mereka dan meningkatkan kesejahteraannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andini, A. (2017). *Analysis Of Determinan Of Human Development In Several ASEAN Countries* Period 2002-2015. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36322/1/AYU ANDINI-FEB %282%29.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36322/1/AYU_ANDINI-FEB%282%29.pdf)
- Anggita, D., & Riyanto, W. H. (2021). Determinan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kepulauan Madura 2010-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(2), 217–232. <https://doi.org/10.22219/jie.v5i2.14349>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia*.
- Basri, M. H. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pembangunan Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap IPM (Studi Pada Wilayah Jawa Timur Periode 2009 – 2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4(2), 1–11.
- Basuki, A. T., & Saptutyningasih, E. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008-2014 ( Studi Kasus Kab / Kota D I Yogyakarta ). *Buletin Ekonomi*, 14(1), 1–20.
- Chotimah, K. (2016). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan kesehatan serta Gini Ratio Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4084>
- Conceicao, P. (2019). *Human development and the SDGs*.
- Hannum, A. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2017*. Universitas Sumatera Utara.
- Ibrahim, Z. (2016). Pengantar Ekonomi Makro. *Serang : Koperasi Syariah Baraka*.
- Mankiw, G. N. (2007). *Makroekonomi (Edisi Keenam)* (Keenam). Erlangga.
- Manurung, E. N., & Hutabarat, F. (2021). Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 4(2), 121–129. <https://doi.org/10.35326/jiam.v4i2.1718>
- Matter, F. (2015). Volume 45, Number 1 (2015) Table of Contents and Front Matter. *Journal of Regional Analysis & Policy*, 45(1), 7881.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan , Tingkat Pengangguran , Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks

- Pembangunan Manusia ( IPM ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 212–222.
- Sholekhah, U. (2018). Analysis Of Determinants Of The Human Development Index (Case Studies On 6 ASEAN Countries). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11.
- Todaro, M.P., & Smith, S. C. (2013). Pembangunan ekonomi edisi kesembilan. *In Erlangga (Vol. 9, Issue 1)*.
- Todaro, M.P dan Smith, S. C. (2009). *Pembangunan Ekonomi* (10 tahun). Pearson Education Limited.
- UNDP. (1995). *Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Yektiningsih, E. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(2), 32–50. <https://doi.org/10.30742/jisa.v18i2.528>